

**TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KPK STUDI KASUS STRATEGI
PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA KEPEMIMPINAN SETYO
BUDIYANTO**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo melalui penguatan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, perubahan strategi, penindakan, penguatan kolaborasi lintas sektoral, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi Lusthaus et al. sebagai teori utama yang didukung oleh teori pemberantasan korupsi Mungiu-Pippidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan sumber data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan KPK pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo dilakukan melalui penguatan organisasi sebagai upaya pemulihan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada *asset recovery*, penguatan pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pemanfaatan transformasi digital melalui Platform Pembelajaran Antikorupsi Indonesia (PRAKTISI), serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi pengelolaan e-LHKPN, berbagai perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kapasitas organisasi, praktik kerja, dan tata kelola kelembagaan yang mengarah pada peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan KPK pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo menunjukkan adanya arah perubahan yang lebih positif dibandingkan kepemimpinan KPK periode sebelumnya. Transformasi ini dilakukan melalui penguatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, kolaborasi antarlembaga, transformasi digital, serta transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi.

Keywords: Transformasi Kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapasitas Organisasi, Asset Recovery, Setyo Budiyo

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE KPK: A CASE
STUDY OF CORRUPTION ERADICATION STRATEGY DURING
SETYO BUDIYANTO'S LEADERSHIP**

Abstract

This study aims to analyze the institutional transformation of the Corruption Eradication Commission (KPK) during the leadership of Setyo Budiyananto through organizational strengthening, human resource development, changes in enforcement strategies, strengthening cross-sectoral collaboration, digital transformation, and improving institutional transparency and accountability. This study uses Lusthaus et al.'s organizational capacity theory as the main theory, supported by Mungiu-Pippidi's corruption eradication theory. This study employs a qualitative approach with an explanatory research design. Data were collected through in-depth interviews and documentation, with primary data obtained from interview results and secondary data obtained through a literature review. The findings show that the institutional transformation of the KPK during Setyo Budiyananto's leadership was carried out through organizational strengthening as an effort to restore institutional capacity, human resource development oriented toward asset recovery, strengthening corruption prevention through the National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK), the utilization of digital transformation through the Indonesian Anti-Corruption Learning Platform (PRAKTISI), and strengthening transparency and accountability through the optimization of e-LHKPN management. These changes indicate adjustments in organizational capacity, work practices, and institutional governance that contribute to improving the effectiveness of corruption eradication. The study concludes that the institutional transformation of the KPK during Setyo Budiyananto's leadership indicates a more positive direction of change compared to the previous KPK leadership period. This transformation was carried out through strengthening organizational capacity and human resources, inter-institutional collaboration, digital transformation, and transparency and accountability to support the effectiveness of corruption eradication.

Keywords: Institutional Transformation, Corruption Eradication Commission (KPK), Organizational Capacity, Asset Recovery, Setyo Budiyananto